

EVALUASI KEBERLANJUTAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KABUPATEN MADIUN

Oleh:

Ferlandoriza Maherda¹; Winarti².; Joko Pramono³

¹Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta dan
BAPPEDA Kabupaten Madiun, ferlandoriza@gmail.com

²Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta,
winartitik@yahoo.co.id

³Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta,
masjepe69@gmail.com

Abstrak

Pada tahun 2017 sampai dengan 2021, 60 (Enam Puluh) desa pada wilayah dengan keterbatasan akses dan rendahnya kualitas air minum di Kabupaten Madiun telah melaksanakan Program Pamsimas.

Titik berat objek penelitian Program Pamsimas ini adalah pada Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsifitas dan Ketepatan pada pelaksanaan program di Kabupaten Madiun, sesuai dengan evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn.

Evaluasi Program Pamsimas di Kabupaten Madiun ini merupakan langkah untuk menganalisis pencapaian program yang telah dilaksanakan, yang dapat digunakan menjadi dasar pengembangan dan keberlanjutan pelaksanaan program pada kegiatan yang dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pamsimas yang telah dilaksanakan tidak semuanya berjalan sesuai harapan, perlu adanya perbaikan pada aspek Sosial/Masyarakat, Keuangan, Kelembagaan, Lingkungan dan Teknis yang menjadi pendukung faktor keberlanjutan sarana air minum untuk meningkatkan cakupan akses air minum aman di Kabupaten Madiun.

Keyword : Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsifitas, Ketepatan

Pendahuluan

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat Kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Pembangunan infrastruktur air minum untuk menyediakan sarana air minum yang terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat yang belum memiliki akses air minum aman di wilayah perdesaan salah satunya adalah dengan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi

Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Kabupaten peserta Program Pamsimas adalah kabupaten yang memiliki cakupan pelayanan air minum aman perdesaan yang belum mencapai 100%. Penetapan kabupaten sasaran dilakukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan peminatan Pemerintah Kabupaten. Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan di wilayah perdesaan dan *peri-urban*.

Secara administratif Kabupaten Madiun terdiri dari 198 desa dan 8 kelurahan yang tersebar di 15 kecamatan. Sebagian besar akses

air bersih masyarakat Kabupaten Madiun telah digunakan untuk kepentingan dan keperluan domestik sanitasi & kebersihan, tetapi terpenuhinya air secara kuantitas tersebut berbanding terbalik dengan pemenuhan kualitas air yang ada dan tersedia di masyarakat, hal tersebut mengakibatkan kerawanan air di beberapa kecamatan dan desa Kabupaten Madiun. Beberapa uji kualitas air yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah mencatatkan hasil kurang /tidak memenuhi ketentuan syarat /*standart* kualitas air minum, sehingga diperlukan program untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada tahun 2017 sampai dengan 2021, 60 desa dalam daftar wilayah dengan keterbatasan akses dan rendahnya kualitas air minum di Kabupaten Madiun telah melaksanakan Program Pamsimas.

Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Pamsimas adalah; (1) kurangnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi (KP SPAMS), (2) Tingginya biaya operasional penggunaan daya energi /PLN yang tidak diimbangi jumlah Sambungan Rumah (SR) yang terpasang, dan (3) kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya air minum aman dan sanitasi layak.

Program Pamsimas telah berakhir pada bulan Desember 2021. Meski banyak hambatan, ketersediaan air minum dan sanitasi merupakan sarana dasar yang penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya kesehatan dan pencegahan stunting sehingga perlu untuk tetap menjaga keberlanjutan Program Pamsimas tersebut.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

analisis kebijakan mengenai keberberlanjutan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Madiun.

Konsep kebijakan publik menurut Sulaiman adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola berbagai aktivitas tertentu yang merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus, dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan pola aktivitas pemerintahan mengenaiejumlah masalah serta mengandung tujuan (Sulaiman, 1998:24).

Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi administrasi publik yang berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Dimensi kebijakan dianalogikan dengan pekerjaan otak yang selalu memutuskan apa yang hendak dikerjakan oleh sistem organ tubuh atau dimensi struktur organisasi melalui suatu energi atau sistem penggerak dan kendali atau dimensi manajemen (Keban, 2008:57).

Evaluasi mempunyai dua aspek yang saling berhubungan; penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik, program, dan aplikasi seangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil ini terhadap beberapa orang, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Bahwa aspek yang saling berhubungan ini menunjukkan kehadiran fakta dan premis-premis nilai di dalam setiap tuntutan evaluatif. Namun banyak aktivitas yang diterangkan sebagai “evaluasi” dalam analisis kebijakan pada dasarnya bersifat non-evaluatif – yaitu aktivitas-aktivitas tersebut

terutama ditekankan pada produksi tuntutan *designative* (faktual) ketimbang tuntutan *evaluative*. Sehingga dibutuhkan suatu pendekatan untuk “penelitian evaluasi” atau “evaluasi kebijakan” (Bardach, E. 2008).

Sedangkan menurut William N. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup: kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali. Untuk mengevaluasi terdapat 6 kriteria evaluasi kebijakan yang harus dijalani, yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsifitas, dan Ketepatan.

Apa yang dikemukakan oleh William N. Dunn tersebut menegaskan bahwa evaluasi kebijakan tidak sekedar mengumpulkan informasi mengenai kebijakan yang dapat diantisipasi dan yang tidak dapat diantisipasi, tetapi evaluasi diarahkan untuk program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) bagi semua individu, kelompok dan masyarakat. Maka dari itu dipilihlah teori William N, Dunn karena dianggap paling tepat dalam hal mengevaluasi pelaksanaan Program Pamsimas di Kabupaten Madiun.

Ruang lingkup kegiatan Program Pamsimas mencakup 5 (lima) komponen proyek yaitu ; (1) Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Desa, (2) Peningkatan Kesehatan dan Pelayanan Sanitasi, (3) Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi, (4) Insentif untuk Desa dan Kabupaten, dan (5) Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek.

Penyediaan air minum, sanitasi, dan kesehatan dapat efektif dan berkelanjutan bila melalui pelibatan seluruh masyarakat (perempuan, laki-laki, kaya dan miskin) dan dilakukan melalui pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (*demand responsive approach*). Untuk itu perlu dilakukan suatu usaha pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun.

Tujuan program Pamsimas adalah meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan terutama bagi masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di daerah pinggiran Kota (*peri-urban*). Secara lebih rinci program Pamsimas bertujuan untuk ; (1) Meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat dimasyarakat, (2) Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, (3) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, (4) Meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

Kemudian dalam penerapan Program Pamsimas, ada 9 (sembilan) prinsip yang digunakan yaitu; (1) Berbasis masyarakat dimana program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan utama dan penanggungjawab kegiatan dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi, (2) Tanggap kebutuhan yaitu

program Pamsimas diberikan kepada lokasi yang membutuhkan, bersedia memelihara dan mengelola sistem yang terbangun, (3) Partisipatif yaitu bahwa seluruh masyarakat (baik miskin, kaya, laki-laki, perempuan) menjadi pelaku utama dan terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan Pamsimas, (4) Kesetaraan Gender yaitu bahwa program ini memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan maupun laki-laki untuk mengambil keputusan, berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan, (5) Keberpihakan kepada masyarakat miskin yang berarti bahwa memastikan masyarakat miskin mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang aman, (6) Akses bagi semua masyarakat yang berarti bahwa Pamsimas memastikan semua masyarakat termasuk masyarakat berkebutuhan khusus (disabilitas) dapat mengakses air minum dan sanitasi yang layak, (7) Keberlanjutan yaitu sarana terbangun dan perubahan perilaku memberikan manfaat secara terus menerus. Keberlanjutan harus diciptakan bersama oleh para pelaku sejak awal pelaksanaan program, (8) Transparansi dan akuntabilitas yang berarti bahwa pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan sarana harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan. Seluruh pelaku terkait dan masyarakat berhak mendapatkan informasi secara akurat dan terpercaya, dan (9) Berbasis nilai yaitu Pamsimas diselenggarakan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur terutama kejujuran, tanpa pamrih dan gotong royong.

Air merupakan kebutuhan dasar manusia, dimana salah satu penggunaannya adalah untuk minum. Sebagai penggunaan untuk minum, yang selanjutnya disebut air minum, maka kualitasnya pun haruslah baik

karena hal ini menyangkut kesehatan tubuh, karena air ini merupakan zat yang masuk ke dalam tubuh. Air minum yang kemudian didefinisikan sebagai air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum yang aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib sebagaimana dimaksud merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum. Parameter tersebut dapat dilihat di lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, disebutkan bahwa; (1) Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, (2) Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum, (3) Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik, (4) Penyelenggaraan

pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum, dan (5) Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pembangunan yang berbasis masyarakat menempatkan posisi masyarakat sebagai aktor/manajer pembangunan dan hanya sedikit melibatkan intervensi pihak lain seperti LSM maupun pemerintah (Hart, R. A., 2013).

Kontribusi pembangunan berbasis masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan diantaranya adalah; (1) Meningkatkan kapasitas lokal, program pelatihan/transfer teknologi, (2) Program pemeliharaan fasilitas umum termasuk pemeliharaan prasarana jaringan air minum perdesaan, dan (3) Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah mengenai program-program apa yang dibutuhkan dan bersifat krusial bagi masyarakat lokal (Nam, T., & Pardo, T. A., 2011).

Chougill (Khansari, N., Mostashari, A., & Mansouri, M., 2014) memberikan pendekatan berupa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan prasarana, yang disarikan dari kajian teoretis dan pengalaman beberapa negara. Dalam pendekatannya adanya keterkaitan antara peran atau intervensi pemerintah, khususnya

pemerintah lokal dengan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan prasarana. Hal ini menguatkan konsep keberlanjutan yang tidak bisa melepaskan pendekatan partisipasi masyarakat di dalamnya dengan bantuan pemerintah dan pihak ketiga (fasilitator).

Adapun prinsip-prinsip yang diutarakan oleh Chougill (Khansari, N., Mostashari, A., & Mansouri, M., 2014) ada 10 (sepuluh) yaitu; (1) Harus disadari bahwa dalam pengelolaan prasarana terdapat dua sektor yakni formal dan non formal, (2) Bahwa dalam pengelolaan prasarana memerlukan teknologi yang mampu dioperasionalkan oleh pengelolanya sendiri (masyarakat) dan menggunakan prinsip cost recovery, (3) Status tanah menjadi masalah yang harus bisa diselesaikan dengan bijak supaya tidak memberikan dampak yang merugikan terhadap sistem perkotaan, (4) Prasarana informal harus didesain dan dibangun dengan bantuan teknis dari luar sehingga dapat disatukan dalam sistem perkotaan, yang harus disadari memerlukan waktu yang lama, (5) Pengelolaan prasarana dan sarana harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pembangunan, operasional serta pemeliharaan. Keterlibatan pemerintah dan pihak ketiga (fasilitator) hanya sebagai supporter bukan lagi sebagai pemilik dan manager dari suatu kegiatan pembangunan, (6) Teknologi yang dipilih harus mampu dioperasionalkan dan dipelihara sendiri oleh masyarakat, (7) Prasarana harus mampu melayani pengguna dengan tingkatan pendapatan yang rendah (miskin), (8) Prasarana yang dibangun harus diterima secara sosial

oleh masyarakat lokal/setempat, (9) Peningkatan peran pemerintah sebagai enabler dan fasilitator dalam pembangunan prasarana diperlukan untuk mencapai cakupan layanan prasarana yang lebih luas, dan (10) Organisasi non pemerintah dapat lebih berperan/terlibat dalam membantu pemberdayaan masyarakat sehingga implementasi pembangunan berbasis partisipasi lebih diterima sebagai pendekatan pembangunan terkini.

Ada beberapa definisi pemberdayaan masyarakat, di antaranya adalah: (1) Sebuah tujuan masa depan yang dikerjakan masyarakat bersama untuk mendapatkan masa depan mereka dan pengembangan yang bersifat timbal balik untuk membantu masyarakat di dalam proses tersebut (Bennett, 2003); dan (2) Pemberdayaan masyarakat adalah perubahan yang perlahan terhadap sisi ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya. Ini adalah proses untuk anggota masyarakat bersama beraktivitas dan menemukan jawaban permasalahan yang dihadapi bersama (Frank et al, 2009).

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2011:21). Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Moh. Nazir, 2012:

54).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif.

Metode kualitatif adalah pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian (Mc. Millan dan Schumacher dalam Soejono, 2012 : 32). Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2012 : 3).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga komponen, yaitu Kondensasi Data (*Data condensation*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*).

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis pengumpulan data ini mempunyai satu aspek umum, analisisnya tergantung dari ketrampilan interaktif dan interpretative dari peneliti. Interpretasi diperlukan karena data yang dikumpulkan jarang berbentuk angka tapi dalam bentuk tulisan dan diskripsi yang panjang.

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang mendekati keseluruhan bagian-

dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, materi-materi empiris lainnya. Kondensasi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian bahkan sebenarnya kondensasi data dapat dilakukan sebelum data terkumpul secara menyeluruh. Kondensasi data ini oleh peneliti dilakukan dengan cara yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atas laporan secara lengkap dan rinci. Selanjutnya laporan tersebut disederhanakan, dirangkum, dipilah hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya.

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data di kondensasi, maka selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel dan sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif digunakan untuk menyajikan hasil wawancara dari informan, tabel digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami data hasil penelitian seperti tabel dan bagan, melengkapi proses analisis sehingga hasil penelitian lebih menarik dan dapat ditarik kesimpulan.

Kegiatan analisis selanjutnya adalah menarik kesimpulan yang merupakan kegiatan akhir kegiatan interpretasi yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari makna yaitu mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi

yang memungkinkan adanya alur sebab akibat dan proposisi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian mengenai keberlanjutan penyediaan sarana air minum ini tidak lepas dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang relevan terhadap keberlanjutan penyediaan sarana air minum salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Mukherjee dan Wijk (2000) yang menjelaskan dimensi/aspek dalam keberlanjutan penyediaan air bersih dan sanitasi, ada 5 dimensi/aspek yaitu ; (1) Sosial/Masyarakat, (2) Keuangan, (3) Kelembagaan, (4) Lingkungan, dan (5) Teknis. Lima aspek tersebut merupakan aspek yang saling mempengaruhi dan saling ketergantungan.

Wawancara dilakukan pada anggota KP SPAMS pada 4 (empat) desa yang mewakili sebaran wilayah dan hasil kualitas capaiannya, yaitu (1) Desa Klangon, (2) Desa Kedungrejo, (3) Desa Kebonsari, dan (4) Desa Sambirejo. Dari unsur Panitia Kemitraan (PAKEM) Pamsimas, dipilih 4 (empat) OPD yang membidangi air minum yaitu ; (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (2) Dinas Kesehatan, (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan (4) PDAM Purabaya. Dan ditambah dari Pendamping Pamsimas sebagai ujung tombak pelaksanaan Pamsimas di Kabupaten Madiun.

Dari hasil wawancara, diperoleh pernyataan yang kemudian dirumuskan dalam 6 (enam) kriteria evaluasi menurut William N. Dunn, dengan hasil sebagai berikut;

1. Efektifitas

Aspek	Rumusan Hasil Wawancara
Sosial/ Masyarakat	- Dilaksanakan sosialisasi tingkat desa dan dukungan masyarakat untuk pelaksanaan Pamsimas. - Pemerintah Desa mengajukan untuk menjadi desa sasaran penerima program.
Keuangan	Masyarakat setuju dan sanggup berkontribusi dalam <i>in-kind</i> dan <i>in-cash</i>
Kelembagaan	Masyarakat membentuk KP SPAMS sebagai lembaga pengelola penyediaan air minum.
Lingkungan	Desa memiliki sumber daya air dengan kualitas yang dipersyaratkan.
Teknis	Distribusi air minum telah melalui Sambungan Rumah (SR).

Pada kriteria ini didapatkan kesimpulan bahwa; (a) Sebelum pelaksanaan Pamsimas perlu adanya sosialisasi di tingkat desa yang bertujuan agar menumbuhkan kesadaran pada masyarakat di desa sasaran pentingnya penggunaan air minum aman dan masyarakat memahami persyaratan dan kewajiban kontribusi terkait keuangan yang dipenuhi untuk pelaksanaan

Pamsimas di desa tersebut, (b) Masyarakat juga sanggup membentuk lembaga pengelola air minum tingkat desa atau disebut KP SPAMS, (c) Desa memiliki sumber air dengan kualitas sesuai yang dipersyaratkan, dan (d) Distribusi air minum menggunakan perpipaan yang langsung dialirkan ke tiap rumah tangga

2. Efisiensi

Aspek	Rumusan Hasil Wawancara
Sosial/ Masyarakat	Melaksanakan perencanaan tahapan-tahapan pelaksanaan
Keuangan	Penganggaran kegiatan dari APBDes, APBD dan APBN berdasarkan perencanaan kegiatan
Kelembagaan	Pembentukan Panitia Kemitraan (PAKEM) untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan Pamsimas, baik dalam tahap perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi.
Lingkungan	Kesesuaian persyaratan desa sasaran untuk diusulkan menjadi penerima program.
Teknis	Pelaksanaan tiap tahapan sesuai dengan waktu yang ditentukan

Dapat dijelaskan dari kriteria ini bahwa ; (a) Masyarakat membentuk Kelompok Kerja Masyarakat (KKM) untuk melaksanakan tahapan program, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, dan (b)

Kegiatan ini bersifat *sharing* pendanaan pada tiap tingkatan anggaran, sehingga perencanaan kegiatan harus sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan tepat waktu pada tahap pelaksanaannya.

3. Kecukupan

Aspek	Rumusan Hasil Wawancara
Sosial/ Masyarakat	Terpasangnya Sambungan Rumah (SR) bermeter
Keuangan	Tersedianya dana In Cash dan In Kind sebagai modal KP-SPAMS melaksanakan penambahan SR
Kelembagaan	Inovasi oleh KP SPAMS pada pelaksanaan program sesuai karakteristik desa
Lingkungan	Kualitas air dari Sumber Air Minum sesuai persyaratan kesehatan
Teknis	Inovasi peningkatan kualitas Sumber Air Minum

Disimpulkan dari kriteria ini bahwa ; (a) Modal awal yang berasal dari dana In Cash dan In Kind warga masyarakat digunakan untuk pemasangan Sambungan Rumah pada tahap awal pelaksanaan, dan (b) Inovasi pengelolaan KP SPAMS yang

sesuai dengan karakteristik masyarakat desa penerimas diperlukan untuk kecukupan terpasangnya Sambungan Rumah (SR) bermeter sesuai dengan perencanaan jumlah yang ditargetkan.

4. Perataan

Aspek	Rumusan Hasil Wawancara
Sosial/ Masyarakat	Akses air minum tersedia 24 jam
Keuangan	Kesanggupan membayar layanan sesuai penggunaan meteran
Kelembagaan	KP SPAMS menentukan biaya layanan penggunaan air
Lingkungan	Pemasangan jaringan sesuai kondisi topografi desa
Teknis	Perluasan jaringan perpipaan dengan debit yang merata

Dari kriteria ini dapat dijelaskan bahwa; (a) Air minum yang dihasilkan dapat terdistribusi dengan layanan 24 jam dengan debit yang merata pada seluruh wilayah desa penerima, dan (b) KP SPAMS

sebagai pengelola layanan air minum di desa penerima menghitung dan menentukan retribusi penggunaan air sesuai dengan air yang dipakai sesuai dengan angka meter pada tiap SR.

5. Responsifitas

Aspek	Rumusan Hasil Wawancara
Sosial/ Masyarakat	Penambahan layanan untuk masyarakat diluar target pemenuhan SR
Keuangan	Penyediaan anggaran diluar mekanisme (dengan DAK, BK)
Kelembagaan	KP SPAMS berkoordinasi dengan PAKEM terkait anggaran
Lingkungan	Kondisi sebaran lingkungan permukiman
Teknis	Penambahan jaringan perpipaan dan SR

Diambil kesimpulan dari kriteria ini bahwa; (a) Peningkatan layanan,

secara bertahap dilakukan penambahan SR pada wilayah diluar

perencanaan awal, baik pada warga yang berkontribusi swadaya pendanaan maupun warga yang tidak berkontribusi tetapi membutuhkan akses air minum aman (warga MBR), dan (b) Untuk itu diperlukan

koordinasi dengan PAKEM untuk penambahan pendanaan, misal pengusulan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan (BK).

6. Ketepatan

Aspek	Rumusan Hasil Wawancara
Sosial/ Masyarakat	Masyarakat merasa ikut memiliki dengan adanya swadaya masyarakat
Keuangan	Peningkatan modal pendanaan untuk pengembangan pelayanan dari sektor selain swadaya masyarakat.
Kelembagaan	Kerjasama dengan BUMDes untuk penambahan modal dari APBDes
Lingkungan	Pemetaan sumber air minum untuk pengembangan di desa lain diluar wilayah pelayanan PDAM
Teknis	Kerjasama dengan PDAM untuk dukungan teknologi dan peningkatan kualitas air

Dari kriteria ini disimpulkan bahwa; (a) Dengan program yang berbasis masyarakat, masyarakat dituntut untuk melaksanakan secara berkesinambungan karena hasil program tersebut sepenuhnya merupakan milik masyarakat di desa penerima, (b) Salah satu opsi peningkatan modal dapat dilakukan kerjasama dengan BUMDes, sehingga pelayanan air minum dilaksanakan dengan optimal dan dapat meningkatkan PAD untuk desa penerima, dan (c) Kerjasama desa penerima dan PDAM sebagai lembaga yang melayani air minum di daerah dapat meningkatkan mutu layanan dan kualitas air minum yang didistribusikan kepada seluruh warga.

Penutup

Berdasarkan penelitian Evaluasi Keberlanjutan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang telah dilakukan di Kabupaten Madiun secara umum pelaksanaan sudah baik, dengan terbangunnya infrastruktur air

minum dari Sarana Air Minum (SAM) Perdesaan dan Sambungan Rumah (SR) pada rumah-rumah warga melalui jaringan perpipaan, walaupun masih terdapat beberapa hambatan pada proses distribusi pelayanannya.

Dari beberapa hambatan tersebut peneliti memberikan saran untuk keberlanjutan Pamsimas di Kabupaten Madiun, sebagai berikut; (1) Masih perlu adanya sosialisasi mengenai kesadaran penggunaan air minum aman untuk kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan penyakit yang diakibatkan oleh air, dan harus dilaksanakan dengan kolaborasi dari seluruh stakeholder bidang air minum, (2) Perlu adanya pelatihan secara rutin terkait pelaksanaan pengelolaan air minum untuk KP SPAMS dan warga desa agar mengetahui perkembangan teknologi terbaru khususnya jaringan distribusi perpipaan, dengan cara bekerja sama dengan PDAM sebagai penyedia layanan air minum yang memiliki kualifikasi standart, (3) KP

SPAMS perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas layanan, salah satunya bekerjasama dengan BUMDes. Dengan kerjasama BUMDes, KP SPAMS akan mendapatkan modal usaha dari APBDes untuk meningkatkan layanan dan meningkatkan pendapatan desa, (4) Perlu monitoring dan evaluasi oleh pemerintah daerah secara rutin pada desa penerima Pamsimas, agar mengetahui apa yang perlu disupport dalam peningkatan capaian air minum, (5) Perlu adanya pemantauan kualitas minimal 6 bulan sekali dari air minum yang dihasilkan oleh sumber-sumber air Pamsimas di seluruh desa penerima, dan (6) Perlu adanya regulasi turunan dan pedoman pelaksanaan yang disesuaikan dengan Kabupaten Madiun, untuk mempermudah desa yang belum mendapatkan Program Pamsimas dapat melakukan replikasi program.

Daftar Pustaka

- Andhi Krisdhianto dan Emenda Sembiring. (2016) *Evaluasi Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Bersih Perdesaan Di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur*. Jurnal Teknik Lingkungan Vol. 22.
- Andito Sidiq Swastomo dan Doddy Aditya Iskandar. (2020) *Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Desa Piji dan Desa Gintungan di Kabupaten Purworejo*. Jurnal Planoearth Universitas Muhammadiyah Mataram Vol. 5.
- Bappenas. (2003). *Kebijakan Nasional Pembangunan Air*

Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun. (2021). *Laporan Akhir Implementasi Program PAMSIMAS III di Kabupaten Madiun*. Madiun: Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.
- Direktur Jenderal Cipta Karya. (2016) *Pedoman Umum Program PAMSIMAS III*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Direktur Jenderal Cipta Karya. (2016) *Petunjuk Teknis Pemilihan Desa Program PAMSIMAS III*. Jakarta : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Gross, Bruce. Wijk, C.V. Mukherjee, Nilanjana. (2000). *Linking Sustainability with Demand, Gender and Poverty*. Belanda: International Water and Sanitation Center.
- Miles dan Huberman dan Saldana (2014: 33) dalam *Analisa Kualitatif* Dr. Sahya Anggara, M.Si. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sri Maryati dan Natasha Indah Rahmani. (2018) *Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Komunitas (Studi Kasus: Hippam Mandiri*

Arjowinangun, Kota Malang).
Jurnal Wilayah dan
Lingkungan Vol. 6.